

AKSES KEUANGAN UNTUK KELOMPOK WARGA MISKIN**FINANCE ACCES FOR ACHIEVING WHEALTINES OF DESTITUDE
GROUP OF PEOPLE****Sri Suryaningsum¹, Moch. Irhas Effendy², Raden Hendry Gusaptono³**¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta,^{2,3}Program Studi Managemen Fakultas Ekonomi, UPN Veteran Yogyakarta,

Jl. SWK Lingkar Utara 104 Yogyakarta, Indonesia

Email: suryaningsumsri@yahoo.com

ABSTRAK

Penggunaan fasilitas perbankan bagi masyarakat kelompok miskin masih sangat kurang. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengambil kebijakan dalam merangkul masyarakat kelompok miskin dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan. Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat kelompok miskin. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung pada masing-masing individu yang berada dalam komunitas masyarakat kelompok miskin. Kelompok miskin ini adalah kelompok buruh yang menghidupi minimal 3 anggota keluarga dan memperoleh upah berkisar Rp750.000.000,00; sd Rp 1.500.000;00. Penelitian dilakukan selama tiga bulan. Hasilnya adalah bahwa pembayaran upah mingguan sangat diharapkan dan dianggap paling tepat. Hasilnya adalah kelompok miskin memiliki persepsi bahwa bank dianggap sebagai tempat yang mewah, berbayar mahal, tempat eksklusif, tidak ada yang ditabung, tidak punya uang, dan tempat orang-orang kaya. Hal ini menyebabkan masyarakat kelompok miskin ini tidak berani masuk bank. Kebijakan yang diambil oleh regulator seharusnya mempertimbangkan hasil penelitian ini, yaitu kebiasaan atas upah mingguan dan berbagai hambatan psikologis yang dirasakan oleh kelompok ini saat mengakses bank.

Keywords : Finance access, Kelompok miskin, Reulator, Upah mingguan

ABSTRACT

Banking facilities are still not enough for group of destitude people. This research is important to do to get more knowledge in policy making to catch group of destitude people, so that they can get similar financial accesibility. This research is done by doing field survey, interviewing destitude society. The method used is direct interview toward them, who live in the group of destitude people areas. The group of destitude people is limited into labours who take care of at least three family members and get the salary at about Rp 750.000,00 - Rp 1.500.000,00. This research is done for three months, and the result shows that they need to be paid weekly because they think that this is the best salary payment way. Destitude group of people think that bank is something impossible for them, a luxurious place which need much money to get in, while they themselves do not have the thing to be deposited. The policy maker should consider this research result so that the group of destitude people have their accesibility in banking (finance access). The reasons should be considered are weekly salary payment and phycology reason.

Keywords : Group of destitude people, Finance access, Regulator, Weekly payment salary.

PENDAHULUAN

Akses perbankan bagi kelompok miskin merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan Prasetiantono (2005) yang menyatakan bahwa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi setiap program pengentasan kemiskinan adalah memberikan akses yang sama kepada lapisan orang miskin, baik akses ekonomi dalam hal ini kredit, yang sebanding dengan akses politik, sehingga mereka dapat terlibat dalam proses produksi dan proses politik. Bank memiliki fungsi intermediasi untuk pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsi sosial yang diemban oleh bank ini merupakan tonggak pembangunan suatu bangsa. Pembangunan akan berhasil jika tidak terlalu besar gap kesejahteraan antar masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan fasilitas perbankan, seharusnya juga dinikmati oleh masyarakat kelompok miskin. Penggunaan fasilitas perbankan bagi masyarakat kelompok miskin masih sangat kurang. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengambil kebijakan dalam merangkul masyarakat kelompok miskin dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan.

Penelitian mengenai akses perbankan bagi masyarakat kelompok miskin ini merupakan lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Suryaningsum, dkk (2015), Suryaningsum & Sugiarti (2014a, b). Suryaningsum dkk (2015) menyatakan bahwa pilihan yang dilakukan dalam menyiasati ketidakmampuan mengakses perbankan bagi kelompok miskin adalah sebagaiberikut pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih memilih berutang kepada perkumpulan arisan. Persepsi kelompok ini adalah bahwa hutang di tempat arisan memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum. Kedua, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok perempuan miskin pemulung. Kelompok perempuan miskin pemulung lebih memilih berhutang pada taukenya/juragannya. Hutang di tempat juragan ada yang dikenai bunga dan ada yang tidak berbunga. Namun demikian juragan ini menentukan syarat bahwa semua hasil pulungan ini harus disetor ke juragan tempat berhutang. Hal yang terjadi adalah ketika setor, harga yang ditetapkan oleh juragan ini lebih rendah dibandingkan di tempat lainnya. Suryaningsum & Sugiarti (2014a, b) menyatakan bahwa kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga lebih teratur administrasi dan pola hidupnya dibandingkan dengan kelompok perempuan miskin pemulung. Suryaningsum & Sugiarti (2014a) memaparkan bahwa permasalahan dalam bidang ekonomi untuk kelompok perempuan miskin pembantu rumah tangga dan kelompok perempuan miskin pemulung memiliki penghasilan sama atau kurang dari satu juta rupiah. Kelompok komunitas kaum wanita pekerja rumah tangga umumnya waktunya habis bekerja di rumah tempatnya bekerja atau majikannya, sehingga tidak memikirkan kehidupan pribadinya apalagi lingkungan, kesehatan, dan ekonominya karena aliran kasnya yang sangat pendek yaitu harian.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan paper ini adalah untuk memaparkan hasil penelitian yang berkaitan dengan aksesibilitas perbankan masyarakat kelompok miskin. Kelompok miskin ini adalah kelompok buruh yang menghidupi minimal 3 anggota keluarga dan memperoleh upah berkisar Rp750.000.000,00; sd Rp 1.500.000, 00. Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat kelompok miskin. Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung pada masing-masing individu yang berada dalam komunitas masyarakat kelompok miskin.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang dilakukan adalah sesuai dengan skema Suryaningsum, dkk (2015), Suryaningsum dan Sugiarti 2014b dan didukung oleh hasil penelitian Suryaningsum dkk, 2014c. Skema penelitian tersebut adalah berupa kegiatan dengan pendekatan pendampingan yang telah dilaksanakan pada bulan Maret 2015 sd Juni 2015. Ada dua puluh (20) responden yang menjadi subjek penelitian ini. Responden tersebut adalah buruh bangunan yang terdiri dari 15 buruh bangunan laki-laki dan 5 buruh bangunan perempuan.

Desain penelitian dengan model pendampingan dengan memberikan dan membantu berbagai kebutuhan pokok untuk dua puluh responden ini adalah paling tepat dilakukan, karena tidak mudah mendapatkan informasi dari responden. Kedua puluh buruh bangunan ini sedang mengerjakan pembangunan mall di Yogyakarta. Mereka merantau dari tempat asalnya dan menetap di bedeng sekitar bangunan yang sedang dikerjakan. Ada rasa curiga jika orang luar masuk dalam komunitas mereka. Mereka hidup terpisah dari masyarakat, sehingga inilah yang membuat mereka memiliki rasa curiga dan berbagai perilaku yang berbeda dengan masyarakat luas.

Kedua puluh responden ini lebih menyukai gambar daripada tulisan, sehingga pertanyaan didesain dengan sangat sederhana. Pertanyaan mencakupi kondisi responden dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan aksesibilitas keuangan. Jawaban responden disimak dengan baik untuk kemudian ditulis dan dibacakan ulang oleh peneliti. Responden membetulkan atau menyetujui, kemudian uraian jawaban ini menjadi dasar analisis paper ini. Peneliti melakukan penulisan jawaban karena responden lebih nyaman kalau yang menulis adalah peneliti dengan alasan jarang mempunyai kesempatan menulis dan menganggap tulisannya jelek tidak bisa terbaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses keuangan bagi kelompok miskin sangat sulit. Hal ini sesuai dengan Prasetiantono (2005), bahwa tidak boleh memberikan penilaian rendah akan kapasitas penduduk miskin dalam memproduksi, dan bahwa kelompok miskin ini mampu mengembalikan kredit dalam waktu yang tepat, dan kelompok ini mampu menghidupi dirinya melalui berbagai usaha pertanian, peternakan, dan kerajinan di desa-desa. Dalam konteks kemiskinan yang dialami perempuan, maka hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan kemiskinan adalah persoalan yang kompleks, dalam hal ini persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada kemiskinan yang berkepanjangan. Sebenarnya upaya pemberdayaan perempuan menjadi kesepakatan dan agenda dunia sejak tiga dekade yang lalu. Kelompok miskin ini lebih mengandalkan sumber-sumber keuangan alternatif seperti hibah program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial dan LSM, rentenir (bank keliling, bank titil, bank plecit, dsb), kerabat dan tetangga. Suryaningsum dkk (2015) menyatakan bahwa akibatnya, mereka menjadi tergantung, usaha tidak berkesinambungan, terjerat hutang, dan tetap dalam lingkaran kemiskinan. Teuku, 2006 menyatakan bahwa ditemukan bahwa laki-laki lebih cenderung menghabiskan sebagian pendapatan mereka untuk kenikmatan pribadi. Ditemukan pula bahwa perempuan memiliki risiko kredit yang lebih baik dari pada laki-laki dan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumberdana yang kecil. Dalam hal kemiskinan berbasis gender, pasti munculnya isu bahwa perempuan miskin lebih penting untuk diprioritaskan dalam hal perilaku yang lebih hemat. Alasan utama mengapa memilih perempuan sebagai pelanggan prioritas adalah karena Grameen Bank menugaskan dirinya untuk memberikan pinjaman kepada yang paling miskin. Zulminarni, 2004 yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umunya mereka bekerja pada sektor informal—perdagangan dan jasa, sektor pertanian—buruh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan issue gender.

Suryaningsum dkk (2015) menyatakan bahwa konsep aksesibilitas akan sukses jika dilaksanakan dengan partisipasi aktif kelompok miskin. Hal ini sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Widodo, dkk 2011 menyakini bahwa model pemberdayaan perempuan nelayan di kawasan pesisir dapat dikembangkan melalui 3 (tiga) tahap, yakni : pengembangan kelompok (*community development*), pra-pengembangan usaha (*pre-business development*), dan pengembangan usaha (*business development*). Konsep Pengembangan Kelompok dibangun dengan konsep *bottom up*. Program pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien harus dilakukan dengan mengubah konsep pemberdayaan dari *Top-Down* menjadi *Bottom-Up*. Hal ini disebabkan karena konsep *top-down*, cenderung mensamaratakan masing-masing wilayah sasaran kegiatan, tanpa melakukan identifikasi potensi yang ada di wilayah sasaran. Kenyataan yang terjadi di lapangan, konsep tersebut menuai kegagalan, yang berakibat pada menurunnya partisipasi dan motivasi masyarakat untuk mengikuti program-program lain di masa mendatang, karena mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses awal penetapan program kegiatan. Sebaliknya, sistem *bottom-up*, diyakini akan berhasil karena masyarakat dilibatkan dalam setiap proses dan tahapan kegiatan program pemberdayaan.

Masyarakat kelompok miskin merupakan kelompok yang sangat besar di Indonesia. Hal ini sesuai Suryaningsum dkk (2015) bahwa penduduk Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang besar. Hal ini sesuai dengan Suryaningsum, dkk 2014a, b dan Ratnawati, 2011. Suryaningsum, dkk 2014b menyatakan bahwa Indonesia memerlukan tata kelola pengentasan yang baik, sedangkan Suryaningsum dkk (2014)

menyatakan bahwa dana keistimewaan akan memiliki *multiplier effect* bagi pengentasan kemiskinan di DIY dan pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan tingkat nasional. Ratnawati, 2011 menyatakan bahwa tahun 2004 jumlah penduduk miskin absolute tercatat sebesar 36,1 juta jiwa atau 16,66% dari total populasi. Berdasar geografi, orang miskin lebih banyak di desa daripada di kota. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan perempuan miskin perdesaan menyangkut pada persoalan bagaimana upaya pemberdayaan perempuan miskin perdesaan melalui kewirausahaan dapat menjamin para pelaku ekonomi rakyat memperoleh apa yang menjadi hak mereka, khususnya kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak. Di Bangladesh sendiri, memiliki sekitar 70persen yang tinggal di pedesaan dan sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan.

Yunus dalam Prasetyantono (2005) berargumen bahwa setiap individu memang berhak untuk bebas mengejar kepentingan ekonominya, sejauh individu-individu tersebut memiliki akses yang sama dalam memasuki aktivitas pasar. Kalau akses ekonomi tidak diperoleh sama, maka ketimpangan sosial yang akan muncul. Soetrisno, 1997; Shiva, 1997; Mies, 1986; Vandana, 1997 menjelaskan bahwa (1) Konteks masyarakat miskin pada umumnya banyak ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (di luar komunitas basis; outsider). Yang tentunya dengan mempertimbangkan unsur pencapaian keberhasilan dalam berbagai bidang. Persoalan yang sering muncul adalah bahwa kebijakan itu dibuat semata-mata berdasarkan model pembangunan colonial-patriarki yang mengutamakan hasil produksi dan mengesampingkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan ekologi. Dalam pemberdayaan yang transformatif, rakyat (dan kaum perempuan) dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan itu. Model pemberdayaan perempuan yang potensial berbasis sumberdaya lokal untuk mengentaskan kemiskinan seperti dijelaskan oleh Astuti (2012) dan Hastuti (2012). Melibatkan peran perempuan sangat penting. Banyak keuntungan yang dapat diraih. Seperti contoh berikut ini kaum perempuan-lah yang paling dekat dengan alam, yang dalam kesehariannya memelihara dan menjaga kelangsungan kehidupan dari alam. Maka jika kebijakan pembangunan itu mengeksploitasi dan merusak alam, sama artinya mengusir perempuan dari sumber penghidupannya, termasuk kesehatan dan ketahanan pangan bagi keluarganya. Dalam konteks tertentu pemberian bantuan dan fasilitas langsung memang perlu dilakukan. Hal ini sesuai dengan Soetrisno, 1997 dan Shiva, 1997 bahwa masyarakat miskin tidak akan mampu mengatasi kemiskinannya tanpa adanya kesadaran bahwa hanya dirinyalah yang mampu menjadi penolong bagi dirinya sendiri, sehingga diperlukan fasilitas bagi lahirnya komunitas basis atau kelompok-kelompok lokal yang berfungsi sebagai pengontrol kebijakan dan pendamping bagi kelompoknya untuk terus melakukan pemberdayaan. Semangat, perilaku, budaya, etos kerja, pola pikir, kemauan yang besar dan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan. Maka dalam proses penyadaran dan pembelajaran dalam kelompok diperlukan dialog untuk menentukan bersama apa-apa yang dapat membawa mereka menuju keberhasilan. Dalam konteks memahami orang miskin dan kemiskinan tidak bisa hanya mendasarkan diri pada pandangan stereotype atas etos kerja yang menganggap bahwa orang miskin itu malas dan tidak hemat. Faktor multidimensi dalam hal ini sesuai dengan Soetrisno dalam Suryaningsum dkk (2015) yang menyatakan bahwa ketidakberuntungan orang miskin haruslah diletakkan dalam konteks yang lebih luas: model pembangunan yang dianut, ketidakadilan social yang mengendap dalam system-struktur, dan berbagai kebijakkan sosio-ekonomi-politik yang tidak menguntungkan bagi si lemah dan miskin.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua puluh responden menyatakan tidak pernah ke bank. Alasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

1. Bank dianggap sebagai tempat yang mewah dan “menakutkan”, karena itu pasti membayar mahal.
2. Hanya sedikit uang untuk ditabung.
3. Tidak paham dengan tata cara yang ada di bank.

Ketiga kesimpulan jawaban ini persis sama dengan hasil penelitian Suryaningsum dkk (2015) untuk kelompok miskin wanita yang terdiri dari komunitas pembantu rumah tangga dan komunitas wanita miskin pemulung. Hal yang membedakan adalah dari segi penerimaan upah, bahwa masyarakat kelompok miskin buruh bangunan lebih menghendaki memperoleh upah mingguan, alasannya buruh tidak tahan menerima upah dalam waktu lama walaupun jumlahnya sama. Satu bulan dianggap terlalu lama dan kebutuhan keluarga sangat mendesak.

Suryaningsum dkk (2015) menyatakan bahwa jika ada kesulitan keuangan, maka perilaku yang muncul adalah sebagaiberikut. Pilihan yang dilakukan oleh responden adalah sebagaiberikut. Menyuruh keluarga berutang lebih dulu. Alasan yang dapat disimpulkan adalah berutang. hutang di tempat arisan

atau kelompok Rukun Tetangga memiliki bunga yang ringan. Padahal setelah dilakukan analisis ternyata bunganya adalah 20% per tahun. Hal ini jauh lebih mahal dari bunga bank secara umum. Hal ini sesuai dengan Ratnawati, 2011 yang menyatakan bahwa golongan miskin cenderung memanfaatkan pelayanan tabungan melalui lembaga informal (kelompok arisan) yang dikelola oleh masyarakat sendiri akibat tidak dapat mengakses pelayanan bank. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi tabungan di kalangan golongan miskin yang belum terlayani. Faktor jauhnya jarak dan formalitas fasilitas tabungan yang disediakan bank membatasi akses masyarakat miskin terhadap tabungan bank. Lembaga formal non-bank, seperti koperasi, hanya menyediakan sangat sedikit fasilitas tabungan, sedangkan lembaga nonformal secara hukum tidak diperbolehkan untuk menarik tabungan dari masyarakat. Keragaman kebutuhan dan kondisi kehidupan golongan miskin turut mempengaruhi keragaman kebutuhan akan pelayanan keuangan mikro. Kecuali transfer, kebutuhan akan kredit, tabungan dan asuransi merupakan kebutuhan nyata dalam keseharian mereka.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Suryaningsum dkk (2015), Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004 yang menyatakan bahwa perempuan merupakan jumlah terbanyak dari kelompok yang terpinggirkan di antara yang paling miskin dari yang miskin. Dalam komunitas miskin seperti Bangladesh, di mana aturan keluarga tidak diterapkan dengan baik, sementara tradisi menjadi lebih penting dari hukum kejadian di mana laki-laki meninggalkan isteri dan anak-anaknya merupakan hal yang biasa. Pemberdayaan ekonomi perempuan memiliki dampak yang sangat besar terhadap terbentuknya keluarga yang stabil. Berbagai pelayanan keuangan belum dinikmati oleh kelompok perempuan miskin pada responden penelitian ini, apalagi pelayanan asuransi formal belum menyentuh masyarakat miskin karena belum adanya layanan asuransi mikro. Secara umum bahwa kebutuhan akan tabungan dan asuransi, baik untuk menghadapi siklus musiman, kebutuhan yang berkaitan dengan peristiwa dalam kehidupan (kematian, perkawinan), maupun untuk investasi jangka panjang lebih banyak dipenuhi dari cara-cara tradisional seperti pemeliharaan ternak, penyimpanan hasil yang berlebih, pembentukan kelompok arisan dan simpan-pinjam, dan sistem pembiayaan bersama berdasarkan kekerabatan.

Dalam hal semangat mengatasi kemiskinan, sebenarnya disebabkan oleh akses yang tidak dimiliki terhadap kegiatan ekonomi. Seandainya diberikan akses yang sama maka akan terjadi pembebasan kemiskinan. Akses bank masih dianggap hal yang mewah. Hal ini juga sesuai dengan Suryaningsum (2015) dan Ratnawati 2011. Jika perbankan masih dianggap tempat yang mewah dan “menakutkan” boleh jadi koperasi yang “benar” menjadi pilihan yang terbaik. Koperasi memiliki karakteristik melayani dari dan untuk anggota. Boleh jadi bentuk koperasi merupakan akses yang terbaik bagi kelompok perempuan miskin. Hal ini sesuai dengan Zulminarni, 2004 menyatakan bahwa paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu, kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol. Apapun upaya yang akan dilakukan dalam memberdayakan perempuan, sudah semestinya mencakup kelima hal di atas, termasuk dalam pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu sumber daya ekonomi bagi mereka. Koperasi dipilih karena mempunyai prinsip-prinsip ekonomi dan sosial yang memungkinkan kelima aspek pemberdayaan diatas dapat dicakup. Dalam hal perbandingan dengan Grameen Bank memajukan akses perempuan miskin di Bangladesh perlu diteladani. Grameen bank tidak memperdulikan sistem perbankan di Bangladesh yang memperlakukan perempuan sebagai peminjam kelas dua, Grameen Bank mampu menciptakan perbandingan 50-50 antara peminjam laki-laki dan perempuan. Tidak perlu waktu lama bagi Grameen Bank untuk melihat bahwa perempuan merupakan pihak yang lebih efektif untuk melakukan perubahan. Kalau ada pendapatan tambahan untuk keluarga melalui perempuan, maka makanan anak-anak, gizi dan kesehatan keluarga, serta perbaikan untuk rumah akan mendapatkan prioritas utama. Hal ini sesuai dengan Syarif, 2006, dan Usman dkk, 2004.

KESIMPULAN

Penggunaan fasilitas perbankan bagi masyarakat kelompok miskin masih sangat kurang. Penelitian ini penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan bagi pengambil kebijakan dalam merangkul masyarakat kelompok miskin dalam meningkatkan aksesibilitas keuangan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan. Hasilnya adalah bahwa pembayaran upah mingguan sangat diharapkan dan dianggap paling tepat. Hasilnya adalah kelompok miskin memiliki persepsi bahwa bank dianggap sebagai tempat yang mewah, berbayar mahal, tempat eksklusif, tidak ada yang ditabung, tidak punya uang, dan tempat orang-orang kaya. Hal ini menyebabkan masyarakat kelompok miskin ini tidak berani masuk bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Mulia. 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Sosiokonsepsia* Vol. 17, No. 03.
- Hastuti dan Dyah Respati. 2012. Naskah Jurnal Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta). Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- <http://news.okezone.com/read/2012/09/24/337/693969/perempuan-menjadi-kelompok-termiskin-dari-rakyat-miskin>
- Kusumaningrum, Dina. 2012. Perempuan menjadi kelompok termiskin dari rakyat miskin. *Okezone*. Senin, 24 September 2012.
- Loekman Soetrisno, *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisus, Yogyakarta, 1997
- Maika, Amelia. Kiswanto, Eddy. 2007. Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil di Perdesaan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro (Grameen Bank). Makalah ini disampaikan dalam seminar Bulanan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Kamis 26 April 2007.
- Maria Mies, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale*, London: Zed Books, 1986
- Ratnawati, Susi. 2011. Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Perdesaan Melalui Pengembangan Kewirausahaan. *Issn. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Widya Kartika Surabaya
- Prasentiantono, A. Tony. 2005. *Rambu-Rambu Yang Diabaikan*. Penerbit Buku Kompas, Gramedia.
- Sucipto, Yeni. 2012. Perempuan Miskin. *Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)*
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014a. Penguatan Ekonomi Kebudayaan DIY Berbasis Anggaran Keuangan Danais. *Prosiding Semnas FE UPNVY*.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2014b. *Tata Kelola Pengentasan Kemiskinan*. Gosyen Publishing.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2015a. 24 Januari 2015. *Akseptibilitas Bank Bagi Kelompok Wanita Miskin*. The 1st University Research Colloquium 2015.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. 2015b. *Bojonegoro District, The Best Governance Role In Economic Development*. USM International Conference on Social Sciens 2015.
- Suryaningsum, Sri. Irhas Effendy, Moch. Gusaptono, Raden Hendry. Sultan. 2014c. *Best Practice pengentasan Kemiskinan*. Laporan PUPT DIKTI RI.
- Suryaningsum, Sri. Sugiari, Wiwik Dewi. 2014a. *Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi Bagi Wanita Pekerja Rumah Tangga*. *Prosiding Semnas UPNVY*.
- Suryaningsum, Sri. Sugiarti, Wiwik Dewi. 2014b. *Managemen Lingkungan Sehat Dan Bersih Serta Bernilai Ekonomi*. Laporan Pengabdian IBM .DIKTI RI.
- Syarif, Teuku. *Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006*. Grameen Bank Membuktikan Perempuan Dan Orang Termiskin Dari Yang Miskin Punya Potensi Untuk Diberdayakan.
- Usman, Syaikh. Suharyo, L Widjajanti. Sulaksono, Bambang. Toyamah, Nina. Mawardi, M Sultan. Akhmadi. 2004. *Keuangan mikro untuk masyarakat miskin di nusa tenggara timur*. *Laporan Lapangan*. Smeru.
- Vandana, Shiva. 1997. *Bebas dari Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997

- Widodo, Slamet. Bustamam, Hendri. Soengkono. 2011. Tahun XXI, No. 1 April. Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin Melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu. *Majalah Ekonomi*
- Zulminarni, Nani. 2004. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Kerangka Pemberdayaan Perempuan Miskin. workshop Berbagi Pengetahuan dan Sumberdaya Keuangan Mikro di Indonesia. GEMA PKM Indonesia dan BWTP, di Jakarta, 27 Agustus 2004.